

Kajian Pemerintahan yang Partisipatif Dalam Pemeliharaan Taman di Kota Kupang (Model Kolaborasi Pemerintah, Korporasi dan Masyarakat Sipil)

Study of Participatory Government in Park Maintenance in Kupang City (Government, Corporations and Civil Society Collaboration Model)

William Djani

FISIP Universitas Nusa Cendana

email: williamdjani@gmail.com

Abstract. *This research is strategically used as a solution instrument for crucial issues related to participatory governance in the management of City Parks, especially in the City of Kupang. By using relevant references, it produces differentiation and new values of City Park management in the development of scientific repertoire in the field of Urban Policy. Therefore, the principle of participatory governance needs to be applied. The problem is how to involve the community in maintaining the City Park? The purpose of this research is to know and analyze Participatory Governance in Park Maintenance in Kupang City. Thus, the current focus of the study on urban parks lies in the aspect of infrastructure, and how local regulations support in providing space for partnerships, as well as how the awareness and willingness of civil society, as well as corporations to participate in the maintenance of city parks, apart from finding a form of cooperation that appropriate and effective in the maintenance of city parks. The results of the study provide two recommendations, namely: (1) the potential of civil society and corporations managing city parks, and (2) forms of cooperation between potential managers (civil society, corporations) and the Kupang City Government. Meanwhile, the long-term goal, in particular, is to propose improvements to local government policies in building a collaboration model between the Kupang city government and the community that ensures the beauty of city parks is maintained. To achieve this goal, the research team reviewed the theories and concepts of participatory governance using a public policy perspective. The goal is that this perspective can focus on research and analysis frameworks that are appropriate, relevant, applicable, measurable with scientifically justifiable methodologies. The results of the study show that many city parks that have been built are expected to be well maintained so that they have attractiveness, and ensure the comfort of visitors to enjoy their beauty. However, the Government certainly has a number of limitations in its maintenance so that it requires continuous improvement. The results of this study were derived as new concepts of participatory government based on the urban social context so that in the end they were able to make a concrete contribution to the achievement of the City Park development program strategy as a green open space. Therefore, the recommendation put forward in this study is the need to build a synergistic actor relationship in the management of City Parks that is supported by adequate regulations.*

Keywords: *Participatory Government, Maintenance, City Park*

Abstrak. Penelitian ini secara strategis sebagai instrumen solutif atas persoalan krusial terkait pemerintahan partisipatif dalam pengelolaan Taman Kota, khususnya di Kota Kupang. Dengan menggunakan referensi yang relevan menghasilkan diferensiasi dan nilai-nilai kebaruan pengelolaan Taman Kota dalam pengembangan khasanah keilmuan bidang Kebijakan Perkotaan. Oleh karena itu, prinsip pemerintahan yang partisipatif perlu diterapkan. Persoalannya bagaimana melibatkan masyarakat dalam memelihara Taman Kota? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Pemerintahan Yang Partisipatif Dalam Pemeliharaan Taman Di Kota Kupang. Dengan demikian maka fokus telaah pada taman kota saat ini, pada aspek sarana-prasarana, bagaimana dukungan peraturan daerah yang memberi ruang kemitraan, bagaimana kesadaran dan kemauan masyarakat sipil dan korporasi berpartisipasi dalam pemeliharaan

taman kota, dan menemukan bentuk kerjasama yang tepat/efektif dalam pemeliharaan tanam kota. Hasil penelitian memberikan rekomendasi dua hal yaitu (1) potensi masyarakat sipil dan korporasi pengelola taman kota, dan (2) bentuk kerjasama antara potensi pengelola (masyarakat sipil, korporasi) dengan Pemerintah Kota Kupang. Sedangkan tujuan jangka panjangnya, secara khusus adalah memberikan usulan perbaikan kebijakan pemerintah daerah dalam membangun model kolaborasi antara pemerintah kota Kupang dan masyarakat yang menjamin keindahan taman kota tetap terpelihara. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, tim peneliti melakukan telaah teori dan konsep Pemerintahan Yang Partisipatif dengan menggunakan perspektif kebijakan publik. Tujuannya agar perspektif tersebut bisa mengarahkan fokus penelitian pada kerangka penelitian dan analisis secara tepat, relevan, aplikatif, terukur dengan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak taman kota yang telah dibangun diharapkan tetap terelihara dengan baik sehingga memiliki daya tarik dan menjamin kenyamanan pengunjung untuk menikmati keindahannya. Namun Pemerintah tentu memiliki sejumlah keterbatasan dalam pemeliharaannya sehingga memerlukan pembenahan secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diderivasi sebagai konsep-konsep baru Pemerintahan Yang Partisipatif berdasarkan konteks sosial perkotaan sehingga pada akhirnya mampu memberi kontribusi konkret bagi capaian strategi program pembangunan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau. Oleh karena itu rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu membangun relasi aktor secara bersinergi dalam pengelolaan Taman Kota yang didukung oleh regulasi yang memadai.

Kata Kunci: Pemerintahan yang partisipatif, memelihara, Taman Kota

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang partisipatif merupakan salah satu prinsip *Good Governance* atau Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, menghendaki partisipasi publik dalam mengelola sektor publik. Partisipasi publik merupakan sebuah keniscayaan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan pada berbagai tingkatan baik pemerintah pusat maupun daerah. Secara teoritis, partisipasi publik memerlukan keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*). Urgensi Pemerintahan yang partisipatif menekankan pada dua persoalan yaitu siapa (korporasi dan organisasi kemasyarakatan-LSM) yang terlibat dalam kerangka kemitraan. Pertanyaan pengarah, mengapa perlunya kemitraan kolaboratif? Karena semua pihak memiliki keterbatasan akses sumberdaya dalam mewujudkan tujuannya masing-masing. Manfaat yang dapat diperoleh melalui kemitraan kolaboratif antara lain (1) institusi pemerintah mendapatkan dukungan sumber daya dari institusi bisnis dan masyarakat sipil yang menjadi mitranya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik; (2) kegiatan bisnis yang dikelola sektor swasta secara sosial lebih dapat diterima oleh publik apabila mereka memiliki kompetensi dan kepekaan sosial dan politik (Selsky & Paker, 2005 dalam Dwiyanto, 2012:270-271).

Pemerintah Kota Kupang telah mengalokasikan anggaran untuk membangun sejumlah Taman Kota sebagai salah bentuk pelayanan publik, selain memperindah kota dengan berbagai fungsi seperti ekologi, estetika, sosial ekonomi dan kesehatan. Untuk itu Taman Kota memerlukan pengelolaan yang baik untuk kelestarian dan keberlanjutannya. Pemeliharaan taman merupakan faktor kunci dalam proses pengelolaan Taman Kota. Oleh karena itu kolaborasi antara pemerintah kota, koorporasi dan masyarakat yang perlu dibangun untuk menjamin keindahan taman kota tetap terpelihara. Sejumlah alasan yang dikemukakan di atas memposisikan kajian ini menjadi penting untuk dilakukan. Fakta empirik menunjukkan bahwa pemerintahan partisipatif telah berjalan, namun peran aktor baik koorporasi maupun masyarakat sipil belum begitu maksimal, pemerintah kota masih berperan sebagai aktor utama dalam pengelolaan Taman Kota. Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan belum terbangun secara sinergi hubungan kerja sama aktor yang

merupakan semangat dan spirit *good governance*, sebagai kondisi *exsisting* model kolaborasi aktor saat ini.

Hal inilah yang menjadi alasan untuk melakukan penelitian pemerintahan partisipatif dalam pemeliharaan Taman Kota di Kota Kupang, sekaligus membangun model kolaborasi antara pemerintah kota, korporasi dan masyarakat sipil dalam pengelolaan Taman Kota.

Perumusan Masalah

Dari uraian-uraian tersebut maka rumusan masalah umum penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana membangun model kolaborasi antara pemerintah kota, korporasi dan masyarakat sipil dalam pengelolaan Taman Kota di Kota Kupang? Dari rumusan masalah umum, ada 4 (empat) rumusan masalah khusus yaitu:

1. Bagaimana kondisi taman di Kota Kupang berserta sarana dan prasarana penunjang?
2. Bagaimana kebijakan Pemerintah Kota yang memberi ruang partisipasi masyarakat sipil dan dunia usaha, khususnya dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan (taman kota)?
3. Bagaimana kesadaran dan kemauan masyarakat sipil dan dunia usaha berpartisipasi dalam pemeliharaan taman kota?
4. Bagaimana bentuk kerjasama antara pemerintah dengan korporasi/dunia usaha dan masyarakat sipil dengan Pemerintah Kota Kupang?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum: membangun model kolaborasi antara Pemerintah Kota, Koorporasi dan Masyarakat Sipil dalam Pengelolaan Taman Kota di Kota Kupang.

Tujuan khusus:

1. Mendeskripsikan kondisi Taman di Kota Kupang berserta sarana dan prasarana penunjang.
2. Mengidentifikasi kebijakan Pemerintah Kota Kupang yang memberi ruang partisipasi masyarakat sipil dan korporasi, khususnya dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan (taman kota).
3. Menjelaskan kesadaran dan kemauan masyarakat sipil dan korporasi berpartisipasi dalam pemeliharaan taman kota.
4. Menemukan bentuk kerjasama yang lebih efektif antara pemerintah Kota Kupang dengan korporasi dan masyarakat sipil.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat akademik terkait pengembangan ilmu dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan manfaat praktis yaitu memberikan kontribusi pemikiran dalam perbaikan kebijakan maupun pelayanan publik. Juga bermanfaat bagi penelitian lanjutan yang ingin melakukan penelitian dengan topik sama maupun yang hampir sama.

Tinjauan Pustaka

Pemerintahan partisipatif menjadi sebuah konsep seiring pergeseran paradigma pemerintahan yang menghendaki *governance* dan *good governance*. Dan oleh karena itu teori-teori yang relevan didialogkan yang dijadikan rujukan untuk membahas permasalahan penelitian ini. Salah satu teori yang sangat terkenal dalam konteks pemerintahan partisipatif yang menghendaki keterlibatan publik dalam mengelola sektor publik. Oleh Arstein (dalam Muluk, 2007: 59) mengemukakan kadar partisipasi sebagai *ladder of participation* (tangga partisipasi). Teori ini mengategorikan partisipasi sebagai kekuasaan warga dalam mempengaruhi perubahan dalam pembuatan kebijakan. Tangga Partisipasi dengan derajat terendah

adalah pertama nonpartisan (manipulasi dan terapi); tangga (derajat) kedua adalah tanda adanya partisipasi (pemberian informasi, konsultasi, penentraman); tangga (derajat) ketiga adalah kuasa warga (kemitraan, kuasa yang didelegasikan, kendali warga). Tangga partisipasi Arstein dikritisi oleh Burns, Hambleton, & Hogget dalam Muluk (2007: 69) dengan mengemukakan sejumlah tangga partisipasi baru yang diberi nama memberi nama Tangga Pemberdayaan dengan memperkenalkan tiga derajat partisipasi yang terdiri dari beberapa anak tangga. Derajat pertama terdiri dari empat anak tangga, derajat kedua terdiri dari enam anak tangga, dan derajat ketiga terdiri dari dua anak tangga. Setiap anak tangga memiliki karakteristik utama: Derajat pertama: nonpartisipasi warga, terdapat empat anak tangga yaitu (1) penipuan warga, (2) konsultasi sinis, (3) informasi yang buruk, dan (4) pemeliharaan pelanggan. Derajat kedua: Partisipasi warga dengan 6 (enam) anak tangga yaitu: (5) informasi berkualitas, (6) konsultasi sejati, (7) Badan Penasehat yang efektif, (8) desentralisasi terbatas pembuatan keputusan, (9) kemitraan, (10) kendali yang didelegasi; Derajat ketiga yaitu kendali warga dengan dua anak tangga yaitu (11) kendali yang dipercayakan, dan (12) interdependensi kendali. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan taman kota tidak hanya pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, tetapi juga pada tahap pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota.

Dalam perspektif kebijakan yang mendukung pengelolaan sector publik, oleh Dunn (1998) bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang tepat diantaranya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, interaksi aktor yang terlibat. Sementara teori yang dikemukakan Nugroho, (2014: 686) bahwa ada lima aspek yang harus dipenuhi untuk efektivitas pengelolaan program yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses dan ketepatan struktur birokrasi, kinerja birokrasi, dan partisipasi masyarakat sejalan dengan hasil penelitian ini. Demikian pula teori yang dikemukakan oleh Pasolong (2014: 64-65) menyatakan bahwa faktor yang turut mempengaruhi tingkat efektivitas kebijakan adalah kurangnya dukungan anggaran dan rendahnya partisipasi para stakeholders dan masyarakat sejalan dengan hasil penelitian ini. Dalam kajian Gampur (2019) menunjukkan bahwa dokumen kebijakan terkait dasar pengembangan Taman Kota sebagai RTH belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena masih terkait dengan permasalahan ruang. Adapun salah satu dokumen kebijakan sebagai dasar pengembangan RTH adalah dokumen rencana detail tata ruang Kota Kupang yang menetapkan beberapa fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa ruang yang dialokasi sebagai fungsi RTH ternyata masih terkait dengan kepemilikan secara personal.

Untuk kebutuhan masyarakat kota yang tidak lagi berada pada kebutuhan primer-sandang, pangan, dan papan-semata, tetapi sudah beralih ke kebutuhan sekunder- hiburan/rekreasi- seperti menikmati keindahan taman kota, maka pemerintah Kota Kupang sudah, sedang dan akan membangun sejumlah taman kota. Taman kota merupakan suatu bentuk aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota, sehingga perlu dijaga kebersihannya oleh berbagai elemen masyarakat. Menurut Djani dkk (2018) bahwa untuk saat ini Kota Kupang telah muncul pegiat lingkungan yang berfokus pada usaha yang berwawasan lingkungan. Pegiat lingkungan yang masuk pada usaha pengelolaan dari sisi kebersihan lingkungan termasuk Taman Kota ini, ternyata sebelumnya merupakan pemerhati masalah sosial lingkungan yang peduli akan lingkungan dan telah melihat potensi yang memadai dalam usaha yang berbasis pada sampah. Menurut Carr et al. dalam Carmona dkk.(1993), taman kota (urban park) dalam suatu permukiman akan berperan efektif dan bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat. Kriteria Taman Kota yang baik menurut Herawati (tt) bahwa kriteria taman kota yang baik adalah:

- a. Letaknya strategis (berada di pusat kota) sehingga mudah diakses semua kalangan masyarakat dan didesain dengan desain universal termasuk memperhatikan kebutuhan khusus kaum difable karena merupakan ruang publik kota.
- b. Memiliki fungsi ekologi (meningkatkan resapan air, membangun jejaring habitat kehidupan liar, menurunkan tingkat polusi udara, berfungsi sebagai paru-paru kota), sosial ekonomi (meningkatkan pendapatan dan interaksi sosial) dan kesehatan (meningkatkan gaya hidup sehat).
- c. Memiliki nilai estetis yang berkontribusi pada estetika kota dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi yang nyaman bagi seluruh kalangan.
- d. Fasilitas serta elemen Taman Kota yang sebaiknya tersedia, vegetasi termasuk pohon peneduh, pedestrian, tempat duduk, arena bermain, jogging track, penerangan yang cukup, tempat sampah, tempat parkir, pos keamanan, toilet, fasilitas kaum difable, anak-anak, serta orang lanjut usia, sarana yang dapat menampung aktivitas yang menjadi kebiasaan warga kota.

Persoalan yang biasa dihadapi oleh pemerintah adalah melakukan pembangunan di semua sektor kehidupan manusia, tetapi belum mampu memelihara hasil-hasil pembangunan dalam waktu yang lama, agar dinikmati masyarakat lebih lama. Dan oleh karena itu dalam rangka pengelolaan Taman Kota yang baik memerlukan kolaborasi aktor yaitu kerjasama antara Pemerintah Kota, Koorporasi dan Masyarakat Sipil. Bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta di Indonesia masih terbatas pada pemerintah sebagai pemilik pekerjaan dengan lembaga nonpemerintah sebagai vendor atau kontraktor seperti dalam pemanfaatan aset pemerintah (Dwiyanto, 2012:250). Kerjasama kontraktual merupakan kerjasama yang hanya mengalihkan pekerjaan pemerintah kepada organisasi privat. Bentuk kerjasama ini memposisikan masyarakat sebagai pelanggan/konsumen, bukan sebagai warga negara. Oleh karena itu kerjasama perlu dikembangkan dalam sejumlah bentuk. Kerjasama dalam kemitraan menurut Bovaird (2004) dalam Dwiyanto (2012:252). Bentuk-bentuk kerjasama oleh Septian (2016) yaitu (a) Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*), (b) Kontrak Manajemen (*Management Contract*), (c) Kontrak Sewa (*Lease Contract*), (d) Bangun Kelola Alih Milik / BKAM (*Build Operate Transfer /BOT*) (e) Kontrak Konsesi (*Concession Contract*).

Dalam kerangka ini terjadi pergeseran paradigma administrasi publik dari *New Publik Management* menuju *New Public Services* yang menghendaki penerapan *Governance* dan *good governance* dalam sektor publik. Perspektif ini menjadi terminologi dalam kebijakan dan politik, konsep ini acapkali digunakan untuk menjelaskan jaringan kebijakan (*policy networks*, Rhodes: 1997), manajemen publik (*public management*, Hood, (1990), koordinasi antar sektor ekonomi, Cambell et al, (1991), kemitraan publik-privat, Pierre, (1998), *corporate governance*, Williamson, (1996) dan *good governance* yang acapkali menjadi syarat utama yang dikemukakan oleh lembaga-lembaga donor asing (Lefwich, 1994). Oleh Wijaya (2009) yang menyatakan bahwa dalam upaya mewujudkan *good governance* di Indonesia, diperlukan adanya *political will* yang kuat dari pemimpin birokrasi maupun politik. Dalam perspektif ini *governance* dipahami sebagai kemitraan antara pemerintah dan swasta dipahami sebagai “pengaturan pekerjaan berdasarkan komitmen timbal balik, melebihi dan di atas yang diatur dalam setiap kontrak, antara satu organisasi di sektor publik dengan organisasi di luar sektor publik”.

Arena kemitraan dalam kerangka kemitraan kolaboratif dapat dilakukan di tiga arena (1) kemitraan antara pemerintah dan institusi bisnis, (2) pemerintah dengan institusi masyarakat sipil, (3) pemerintah dengan institusi bisnis dan institusi masyarakat sipil sekaligus. Arena kemitraan ini juga dipahami sebagai bentuk-bentuk kemitraan antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil. Dalam pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota, dapat mempertimbangkan

ketiga bentuk kemitraan tersebut dengan mempelajari kelebihan, kekurangan, peluang dan amcaman guna memilih bentuk kemitraan yang lebih tepat dengan kondisi pemerintah, korporasi dan masyarakat sipil di Kota Kupang.

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan memperlihatkan fenomena terkait Pemerintahan Partisipatif Dalam Pemeliharaan Taman Kota Kupang; (Strauss dan Anselm, 1987). Penelitian dilakukan di Kota Kupang yang diarahkan pada pada 3 lokasi yaitu pada 7 Taman besar, 3 Taman Kecil dan 2 Boulevard (jalan raya). Yang menjadi kajian penelitian ini sebagai fokusnya yaitu: (a) kondisi taman kota dengan sarana dan prasarana penunjang, (b) aspek kebijakan, (c) kesadaran dan kemauan masyarakat sipil dan dunia usaha berpartisipasi dalam pemeliharaan taman kota, (d) bentuk kerjasama aktor. Jenis Dan Sumber Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu FGD, Wawancara, Observasi dan Dokumentasi, dengan teknik analisis data menggunakan analisis komponensial yang merupakan teknik analisis data kualitatif melalui analisis terhadap unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan kontras satu sama lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian pembahasan ini merupakan deskripsi atas hasil penelitian dan paparan data sesuai fokus peneltian yang telah di tetapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari aspek (a) Sarana dan prasarana Taman Kota yang ada di Kota Kupang belum memiliki kecukupan sarana dan prasarana yang memadai dan memerlukan pembenahan secara berkelanjutan. Walaupun ada variasi sarana dan prasarana antara satu taman kota dengan taman kota yang lain, yang tidak terlepas dari fungsi ekologi, estitika, sosial ekonomi dan kesehatan. (b) Pada aspek Kebijakan Pemerintah Kota yang memberi ruang partisipasi masyarakat sipil dan dunia usaha, dalam pemeliharaan hasil-hasilnya belum begitu memadai yaitu belum ada Peraturan daerah ataupun Keputusan Wali Kota untuk mengatur kerjasama aktor. Dukungan kebijakan baik makro maupun mikro penting disiapkan dalam rangka memberikan ruang partisipasi bagi para aktor. Fakta empirik menunjukan kolaborasi aktor untuk pengelolaan Taman Kota belum berjalan dengan baik, pemerintah Kota Kupang masih memposisikan diri sebagai aktor yang memiliki tanggungjawab dalam pengelolaan Taman Kota. Partisipasi aktor dunia usaha dan masyarakat belum tampak secara optimal. (c) Kemudian pada aspek koorporasi dan masyarakat sipil yang dilihat dari kesadaran dan kemauan aktor untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Taman Kota sebagai perwujudan ruang terbuka hijau publik memerlukan dorongan untuk memiliki tanggungjawab dan komitmen dalam memelihara Taman Kota agar bersih, lestari. (d) Terkait dengan bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Kupang, koorporasi dan masyarakat masih mengalami permasalahan, dari segi regulasi maupun sumberdaya dari masing-masing pihak. Dari pihak Pemerintah Kota, belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang kerjasama aktor dalam pengelolaan Taman Kota sebagai payung hukum untuk bertanggung jawab dalam pemeliharaan Taman Kota. Koorporasi atau swasta sebagai pihak yang bertanggung jawab dari sisi perawatan dan pemeliharannya memiliki kendala yaitu terkait perjanjian kerjasama. Pengelolaan Taman Kota memerlukan regulasi yang saling menguntungkan. Pada pihak masyarakat, terkesan masih minimnya kesadaran akan pentingnya kebersihan taman. Masyarakat belum

memiliki tanggung jawab dan perasaan memiliki taman kota untuk tetap menjaga dan memelihara sebagai miliknya, namun meninggalkan jejak-jejak sampah.

Hasil penelitian ini jika disandingkan dengan rujukan teoritik tentang dimensi Taman Kota yang efektif menunjukkan bahwa pengelolaan Taman Kota Kupang yang walaupun berjalan, namun memerlukan pembenahan secara bertahap untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pengunjung Taman Kota memang merasakan keamanan dan nyaman, sementara kegiatan yang bersifat aktif maupun pasif dan dimensi yang atraktif belum menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan masyarakat. Dimensi-dimensi taman kota yang efektif dan memberikan manfaat bagi warga masyarakat yang jika dikaitkan dengan pendapat Carr *et al.* dalam Carmona dkk.(2003), bahwa taman kota (*urban park*) dalam suatu permukiman memiliki empat unsur antara lain:

1. *Comfort*, merupakan unsur keamanan pengguna dari gangguan.
2. *Relaxation*, merupakan nyaman dengan unsur buatan manusia.
3. *Passive and Active engagement*, merupakan unsur kegiatan yang bersifat aktif maupun pasif.
4. *Discovery*, merupakan unsur kegiatan yang bersifat atraktif.

Dari perspektif kebijakan yang merupakan salah satu faktor utama yang mendukung ruang partisipasi para aktor dalam pengelolaan Taman Kota yang baik. Kebijakan yang melibatkan masyarakat dan korporasi/dunia usaha dalam perumusan kebijakan merupakan proses yang turut menentukan kualitas kebijakan. Pendekatan seperti ini melahirkan *bottom up planning*. Tanggungjawab dari sisi kebijakan yang melibatkan masyarakat dan korporasi/dunia usaha akan mengakomodir kebutuhan dan permasalahan publik. Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perumusan kebijakan dalam pengelolaan Taman Kota di Kota Kupang, pada umumnya belum maksimal, masyarakat kurang dilibatkan dalam ranah kebijakan. Seharusnya masyarakat dan dunia usaha mempunyai peran yang sangat penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan Taman Kota, karena peran aktif dan dukungan masyarakat, dunia usaha dalam perumusan kebijakan akan memberikan tanggungjawab untuk mengelola Taman Kota secara baik yang melahirkan pengelolaan berbasis relasi aktor.

Jika peran aktor bersinergi secara baik dalam mengelola Taman Kota maka permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Kota Kupang dapat diminimalisir atau paling tidak masalah Taman Kota dapat disolusi. Dominasi Pemerintah Kota harus diperkecil baik dalam perumusan kebijakannya maupun implementasi kebijakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota berperan sebagai regulator atau sebagai perumus kebijakan, dalam kurung waktu kurang lebih sepuluh tahun hanya menghasilkan 1 (satu) Peraturan daerah, dan belum menyiapkan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai turunan dari Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kupang. Kondisi ini jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gampur (2019) menunjukkan bahwa dokumen kebijakan sebagai dasar pengembangan Taman Kota sebagai RTH belum sepenuhnya dapat diimplementasikan karena masih terkait dengan permasalahan ruang. Adapun salah satu dokumen kebijakan sebagai dasar pengembangan RTH adalah dokumen rencana detail tata ruang Kota Kupang yang menetapkan beberapa fungsi ruang sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Beberapa ruang yang dialokasi sebagai fungsi RTH ternyata masih terkait dengan kepemilikan secara personal. Ada beberapa alokasi fungsi ruang sebagai RTH dalam dokumen peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang Kota Kupang, namun kawasan tersebut masih menjadi milik perorangan bahkan ada yang sudah mempunyai sertifikat kepemilikan lahan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas dokumen kebijakan terkait dengan pengembangan RTH masih rendah. Jika aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan Taman Kota dapat berperan secara maksimal maka

persoalan Taman Kota dapat teratasi, seperti dikemukakan Dunn (1998) bahwa keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh kebijakan yang tepat diantaranya melibatkan masyarakat dalam proses perumusan, interaksi aktor yang terlibat.

Jika ditelaah dari aspek kesadaran dan kemauan masyarakat sipil dan korporasi dalam pengelolaan Taman Kota memerlukan perhatian agar kedua aktor ini memiliki tanggungjawab sekaligus sebagai pemilik Taman Kota. Kolaborasi aktor masih menjadi kendala akan tetapi untuk mewujudkan Taman Kota yang bersih, bebas sampah membutuhkan kerjasama aktor, dan menurut Djani dkk (2018) saat ini pemerintah Kota Kupang sedang membuka jaringan dengan aktor masyarakat, dunia usaha bahkan pegiat lingkungan untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan di Kota Kupang. Pengembangan peran ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang untuk menggandeng pengusaha-pengusaha dan aktor lainnya dengan tujuan agar pemeliharaan Taman Kota tetap bersih yang tidak berserakan sampah. Mengelola Taman Kota membutuhkan peran aktor baik pemerintah Kota, masyarakat, dunia usaha, bahkan juga Perguruan Tinggi secara bersinergi dari aspek kebijakan maupun pelaksanaannya. Pembahasan hasil penelitian, terkait dengan kemauan masyarakat sipil dan dunia usaha berpartisipasi dalam pemeliharaan Taman Kota sebagai perwujudan ruang terbuka hijau publik memiliki implikasi dalam pengelolaan Taman Kota sebagai RTH publik di Kota Kupang. Oleh karena itu, maka teori yang dikemukakan Nugroho, (2014: 686) bahwa ada lima aspek yang harus dipenuhi untuk efektivitas pengelolaan program yaitu: ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksanaan, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses dan ketepatan struktur birokrasi, kinerja birokrasi, dan partisipasi masyarakat sejalan dengan hasil penelitian ini. Dari aspek kerjasama antara pemerintah kota, masyarakat dan swasta merupakan terobosan yang bisa dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah termasuk pengelolaan Taman Kota. Selain itu, pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang dewasa ini telah menjadi trend atau kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Tata pemerintahan yang baik menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan adanya keseimbangan interaksi dan keterlibatan antara pemerintah, dunia usaha (swasta), dan masyarakat (*civil society*). Terdapat sejumlah tipe kemitraan yang didasarkan pada derajat risiko yang ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul dari hubungan tersebut. Berikut ini bentuk-bentuk KPS secara umum oleh Septian (2016) yaitu (a) Kontrak Jasa Pelayanan (*Service Contract*), (b) Kontrak Manajemen (*Management Contract*), (c) Kontrak Sewa (*Lease Contract*), (d) Bangun Kelola Alih Milik / BKAM (*Build Operate Transfer /BOT*). Model partnership antara Pemerintah Kota Kupang dengan masyarakat dan korporasi bisa menggunakan salah satu bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kelemahan. Bentuk kerjasama Pemerintah Kota dengan korporasi dan masyarakat sipil memerlukan pengaturan yang saling menguntungkan dan menempatkan para aktor korporasi dan masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan.

Korporasi yang diseleksi sehingga memiliki sumberdaya bermitra dengan Pemerintah Kota Kupang dalam pengelolaan Taman Kota dari aspek pemeliharaan secara berkelanjutan. Pemerintah Kota Kupang kedepan melakukan addendum perjanjian kerjasama mengenai desain dan pengelolaan Taman Kota dari aspek pemeliharaan taman agar taman-taman tersebut menjadi taman aktif dan dapat dipergunakan oleh masyarakat. Payung hukum yang mengatur kerjasama tentang penataan dan pemeliharaan taman bisa menggunakan *Memorandum of Understanding/ MoU* yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak. Kerjasama antara

Pemerintah Kota Kupang koorporasi dan masyarakat sipil dalam penataan dan pemeliharaan Taman Kota.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Taman Kota yang baik membutuhkan sarana dan prasarana, regulasi makro dan mikro, kesadaran dan kemauan para aktor untuk memelihara Taman Kota yang disertai dengan kejelasan bentuk kerjasama aktor. Pengelolaan Taman Kota yang ideal untuk semua kalangan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan partisipatif di Kota Kupang memerlukan terobosan membangun relasi aktor, antara Pemerintah Kota, koorporasi, dan masyarakat sipil dalam memelihara Taman Kota.

Saran

Rekomendasi untuk penelitian ini sekaligus sebagai usulan kebijakan pengelolaan Taman Kota yaitu perlu peningkatan sarana prasarana, dukungan kebijakan mikro, menumbuhkan kesadaran para aktor sehingga memiliki tanggungjawab dan rasa memiliki Taman Kota, dan kerjasama para aktor yang saling menguntungkan serta komitmen dalam pemanfaatan dan pemeliharaan Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau/RTH

DAFTAR PUSTAKA

- Ari Dwipayana. 2003. Membangun Good Governance di Jokjakarta: IRE (Institute for Research Empowerment)
- Badriyah, Laelatul. 2018. Kajian Dampak Sosial Ekonomi Dan Strategi Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dari Adanya Taman Kota Di Kota Semarang, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas negeri Semarang.
- Budiardjo Eko, Sujarto Djoko. 2009. Kota Berkelanjutan (Sustainable City), Penerbit Pt. Alumni, Bandung.
- Dunn, William N. 1998. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, edisi kedua, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2003. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus, dkk. 2012. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaborasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro. 2004. Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat, APMD Press, Yogyakarta.
- Kahfi Dwi Septian Kahfi Dwi Septian. 2016, Kemitraan Antara Pemerintah Kota Bogor-Dengan-Swasta, Dalam Penataan Dan Pemeliharaan Taman Tahun 2013-2016. Departemen-Politik-Dan-Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan-Ilmu-Politik Universitas Diponegoro
- Muluk, Mujibur Rahman Khairul. 2007. Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah, Sebuah Kajian Administrasi Publik dengan Pendekatan Berpikir Sistem. Bayumedia Publishing, Malang.
- Nurmandi Achmad. 2014. Manajemen Perkotaan, Teori Organisasi, Perencanaan, Perumahan, Pelayanan dan Transportasi Mewujudkan Kota Cerdas, JKsG, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong Harbani. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung: Alfabeta.
- Sadyohutomo, Mulyono. 2009. Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan, Bumi Aksara, Jakarta.
- Sari Suzanna Ratih, Dhanoe Iswanto, Djoko Indrosaptono. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Kota Yang Sehat Studi Kasus:

- Kawasan Kota Lama Semarang, Available online through <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/modul> , diakses 01 Juli 2021.
- Strauss, Anselm, L. (1987). *Qualitative Analysis for Social Scientist*. Cambridge University Press.
- Sumarmi. 2010. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Perkotaan; Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Geografi Lingkungan pada Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang- (UM),-Tanggal:6-Juli-2010.
<http://digilib.um.ac.id/images/stories/pidatogurubesar/-gurubesar/Juni10>, diakses 01 Juli 2021.
- Wenseslaus Gampur. 2019. *Pengaruh Sistem Administrasi Publik Terhadap Kinerja Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Kupang*. PPS Undana Kupang
- William Djani dkk. (2018). *Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Kupang*, FISIP Undana Kupang.
- Winarni, Budi. 2013. *Etika Pembangunan*, Caps, Yogyakarta.
- Yunus Hadi Sabari. 2015. *Manajemen Kota Perspektif Spasial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.